

Pilkada dan Sisi Gelapnya



Ilham Aldelano Azre
Dosen Administrasi
Publik FISIP Unand

PILKADA merupakan bagian kecil dari berprosesnya demokratisasi pada tingkat lokal, proses demokratisasi tersebut akan berujung kepada akuntabilitas dan responsivitas pemimpin daerah.

Selain itu, pilkada diharapkan mendorong partisipasi masyarakat dalam

berpolitik untuk mewujudkan pemberdayaan kewarganegaraan (*citizenship*) yang akan menjadi modal sosial, sehingga proses demokratisasi di tingkat lokal akan semakin kuat dan dengan sendirinya akan melindungi sistem demokrasi dari alienasi masyarakat dari kehidupan politik.

Pilkada adalah sebuah proses legitimasi politik yang diperoleh kepala daerah dan wakilnya untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan, kedatangan warga untuk memilih di dalam pilkada melalui mekanisme pemilihan langsung akan melembagakan legitimasi yang dimiliki oleh kepala daerah dan wakilnya. Akan tetapi legitimasi politik yang diperoleh dari masyarakat tidak dimanfaatkan secara maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memacu perumbuhan/pembangunan daerah. Pilkada oleh sebagian kalangan dianggap tidak mampu melahirkan pemimpin yang berjiwa negarawan, pemimpin yang berpikiran kerdil hanya mengutamakan kepentingan ekonomi kelompok-kelompok tertentu, pemimpin yang berperilaku koruptif, dan banyak hal negatif lainnya.

Sisi Gelap Pilkada

Sangat menarik ulasan dari Dr Asrinaldi di Teras Utama Padang Ekspres hari Senin 15 Januari 2018 yang membahas

mengenai masalah dan pertikaian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang merupakan produk langsung dari pilkada, konflik tersebut tentu saja memberikan efek negatif kepada penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks lokal Sumatera Barat sendiri

masyarakat disuguhi oleh konflik Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi dan Wabupnya Ferizal Ridwan yang berujung kepada somasi dan gugatan Ferizal Ridwan kepada Irfendi Arbi berkenaan dengan Perbup No 31 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas dalam Daerah dan Luar Daerah Kabupaten Limapuluh walau akhirnya gugatan tersebut dicabut dengan sendirinya oleh Wabup Ferizal Ridwan.

Tidak hanya di Kabupaten Limapuluh Kota saja, Kota Padangpanjang juga mengalami hal serupa berkaitan dengan kepemimpinan di daerah tersebut. Gubernur Sumatera Barat bahkan membentuk sebuah Tim Harmonisasi Kepala Daerah sebagai salah satu bentuk cara "mendamaikan" kepala daerah dan wakilnya.

Cerita dan fakta buruk tentang kepala daerah dan wakilnya sebagai produk langsung pilkada juga menyentuh pada aspek hukum, misalnya mengenai kasus korupsi. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi

sejak tahun 2004-2017 ada 79 kepala daerah yang tersangkut oleh kasus korupsi 18 di antaranya gubernur dan 61 sisanya adalah wali kota atau bupati. Jika lebih dirunut ke belakang menurut data Kemendagri sejak era reformasi hingga tahun 2017 total ada 362 kepala daerah yang terseret oleh kasus korupsi yang ditangani oleh KPK, Kejaksaan dan Kepolisian.

Faktor pendanaan politik yang tinggi dalam pelaksanaan pilkada menyebabkan menjamurnya perilaku rente yang akan menyuburkan tumbuhnya *stationary bandit* dan *roving bandit* pada tingkat politik lokal. Hal ini tentu saja membahayakan proses demokrati-

sasi di tingkat lokal, elite-elite politik yang notabene adalah motor utama penggerak demokratisasi justru terjebak dalam perilaku perburuan rente dan koruptif. Liberalisasi sistem politik yang tercermin dalam pelaksanaan pilkada justru memperluas ruang praktik kotor, korup dan manipulatif dari aktor-aktornya.

Besarnya pendanaan dan utang politik kepada kaum pemodal dalam pelaksanaan pilkada tentu akan berpengaruh terhadap pemenuhan janji politik kepala daerah. Janji politik kepada pendukung, pemilih dan tim sukses merupakan sesuatu yang harus dibayar paskakemenangan, balas jasa atas dukungan dan sokongan dari pengikut ini akan berimplikasi dengan apa yang bisa didapatkan oleh pengikut tersebut. Praktik ini menyuburkan peluang terjadi korupsi karena kepala daerah akan memberikan konsensi-konsensi tertentu berupa kebijakan atau *privilege* tertentu kepada orang sekitar yang berjasa dalam memenangkan konstestasi pilkada.

Pilkada sebagai sebuah proses perwujudan demokratisasi pada titik tertentu juga menghasilkan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pilkada juga menghasilkan oligarki di sebuah daerah yang kemudian menjadi dinasti poli-

tik yang sangat berkuasa dan menguasai jabatan politik, serta sumber ekonomi. Selain dinasti politik, kecenderungan saat ini yang muncul adalah perilaku untuk memborong semua partai politik yang ada, sehingga saat pilkada nantinya akan berhadapan dengan kotak kosong. Hal ini jamak dilakukan oleh *incumbent* yang se-

dang berkuasa.

Kecenderungan melawan kotak kosong ini juga meningkat, pada tahun 2017 hanya ada 9 daerah yang pilkadanya melawan kotak kosong. Sementara pada tahun 2018 terdapat 13 daerah yang melawan kotak kosong. Hal ini menurut penulis juga dipengaruhi oleh kecenderungan semakin pragmatisnya partai politik dalam mengusung calon kepala daerah dalam pilkada. Semakin pragmatisnya partai politik tentu akan membuat partai politik mengabdikan kepada oligarki di level elite itu sendiri, karena elite partai politik juga terjebak kepada *rent seeking*

activities bukan kepada pemenuhan tanggung jawab terhadap pemilihnya. Sikap pragmatisme partai politik ini tergambar jika sesudah pilkada akan mendekati kepada pemerintah daerah yang memiliki sumber keuangan. Sehingga, mekanisme *check and balances* hanya bersifat formalitas belaka.

Fenomena yang penulis jabarkan di atas berupa pecah kongsi/konflik kepala daerah dan wakilnya, suburnya praktik korupsi baik itu korupsi politik ataupun korupsi *electoral*, makin menjamurnya *money* politik, munculnya elite lokal yang terafiliasi dan berburu rente dalam kegiatan ekonomi daerah, pragmatisme partai politik, fenomena golput yang semakin tinggi. Fenomena tersebut adalah sesuatu yang harus diperbaiki secara bersama untuk masa datang, jika tidak ada langkah perbaikan untuk masa akan datang bukan tidak mungkin pilkada sebagai proses demokrasi yang kita jalani saat ini akan mengalami pembusukan dan mendekati lonceng kuburnya sendiri. (*)